



JURNAL PSIKOHUMANIKA

<http://ejournal.setiabudi.ac.id/ojs/index.php/psikohumanika>

KOMUNIKASI DALAM KELUARGA TRADISIONAL YANG MENGALAMI KONFLIK KARENA PILKADA DI KABUPATEN ALOR

Nandorari Saptenty Buling¹, Aloysius L.S. Soesilo²

Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana,
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia 50711

ARTICLE INFO

Article History

Be accepted:

Januari 2021

Approved:

Juni 2021

Published:

Juni 2021

Keywords :

Electoral Conflict;

Family Communication;

Traditional Family;

Kinship

ABSTRACT

In Alor regency, electoral conflicts that occurs inside a family usually happens out of disagreements on the different political affiliations among the family members. Previous research did show how the hierarchy of authority inside traditional Indonesian family were formed, but it did not show how the hierarchy itself communicate and manage the conflict that risen inside that traditional family. This study tries to illustrate how the communications among family members occurs during and after the electoral conflict that happened on Alorese traditional family. This descriptive-phenomenology research emphasized on subjective experiences of the participants, that were recorded throughout series of interviews and verbatim analysis. The two participants were the members of both nuclear and extended families respectively, that experienced conflict towards other family members regarding their political choices. The results of this study shows that hierarchy of authority and the kinship within the traditional family does heavily affects the political affiliations, communication patterns and conflict management inside it. It also shows the important role of kinship on the reconciliation process between the family members after the conflict had concluded.

Alamat Korespondensi:

Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana,
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia
50711

E-mail:

nandorary@gmail.com

alsoes16@gmail.com

p-ISSN: 1979-0341

e-ISSN : 2302-0660

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah Artikel	<p>Di Kabupaten Alor, konflik keluarga akibat Pilkada sering kali terjadi karena adanya gesekan antara anggota keluarga yang memiliki pilihan politik yang berbeda dari anggota keluarga lainnya. Penelitian sebelumnya mengenai sistem keluarga yang ada di Indonesia memang menunjukkan seperti apa pola hierarki otoritas yang ada di dalam keluarga tradisional di Indonesia, namun tidak menunjukkan bagaimana proses komunikasi yang muncul dalam keluarga di dalam <i>setting</i> masyarakat tradisional, di dalam melaksanakan penyelesaian masalah. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana proses komunikasi dalam konflik Pilkada di dalam keluarga tradisional di Kabupaten Alor. Penelitian dengan metode deskriptif-fenomenologis ini menekankan pengalaman subjektif partisipan, yang dilakukan melalui wawancara dan analisa verbatim. Subjek dari penelitian ini adalah anggota keluarga dari keluarga inti sekaligus <i>extended family</i> mereka masing-masing yang mengalami konflik karena perbedaan pilihan politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam <i>setting</i> masyarakat tradisional, hierarki otoritas dan ikatan <i>kinship</i> yang dimiliki oleh suatu masyarakat tradisional sangat mempengaruhi pola komunikasi antara anggota keluarga, dan nantinya dapat mempengaruhi pilihan politik anggota keluarga di dalam keluarga terkait. Ikatan <i>kinship</i> juga sangat mempengaruhi proses rekonsiliasi antara anggota keluarga setelah konflik itu selesai.</p>
Diterima :	
Januari 2021	
Disetujui:	
Juni 2021	
Dipublikasikan:	
Juni 2021	
Kata Kunci:	
Konflik Pilkada; Komunikasi Keluarga; Keluarga Tradisional; Kinship	

PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau lazimnya disebut Pemilu merupakan sebuah proses pemilihan orang untuk mengisi suatu jabatan tertentu, yang dilakukan secara bebas dan langsung oleh rakyat. Di Indonesia, Pemilihan umum yaitu Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif, telah diatur di dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Para calon pemimpin dan calon wakil rakyat yang akan dipimpin harus melakukan proses pendekatan dan persuasi kepada para calon pemilih, agar bisa mendapatkan suara dari para pemilih. Proses persuasi ini merupakan hal yang biasa, yang lazimnya disebut sebagai kampanye politik. Kampanye dalam pemilihan umum sendiri diatur dalam pasal 7 sampai pasal 18 PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Kampanye dilakukan oleh para calon pemimpin dan calon wakil rakyat, dengan bertujuan untuk meyakinkan rakyat untuk memilih calon bersangkutan. Para calon pemimpin dan wakil rakyat harus menunjukkan visi dan misi mereka untuk dapat meyakinkan masyarakat agar memperoleh suara dalam pemilu nanti. Maka dari itu, perbedaan pandangan dan visi dan misi dari para calon menjadi hal yang lazim terjadi. Namun perbedaan pandangan ini kerap menjadi sebuah pemicu masalah, ketika pendukung dari masing-masing calon mulai terpecah dan saling menjauhi karena perbedaan pilihan politik.

Pada tahun 2014, survei yang dilakukan oleh lembaga PollMark Indonesia menemukan adanya peningkatan rusaknya hubungan sosial selama kurun waktu 2014-2017. Peningkatan itu didapat dari hasil survei PolMark yang dilakukan saat pilpres 2014 dan pilkada DKI Jakarta 2017. Berdasarkan survei yang dilakukan PolMark pada kurun waktu 2014-2017, hasil responden menunjukkan peningkatan dalam kerusakan hubungan pertemanan sebesar 2 %, yaitu semula dari 4,3% pada tahun 2014 naik menjadi 5,7% pada tahun 2017 (“Perpecahan Masyarakat”, 2018). Sementara itu, dilansir dari laman portal berita online *Vice.com*, berdasarkan pada wawancara yang dilakukan di Ibukota Jakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa

perbedaan pilihan politik mampu membawa kepada sikap permusuhan seperti pemblokiran di media sosial, menghilangkan hubungan pertemanan, bahkan cekcok atau adu mulut ketika bertemu dengan orang yang berbeda pandangan politik (“Bangsa kita sekarang”, 2018).

Perpecahan yang diakibatkan pemilu tidak hanya melahirkan sikap bermusuhan, namun perilaku juga perilaku destruktif. Di Aceh pada tahun 2014, menurut laporan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS, 2014), telah ada 81 kasus pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang periode kampanye, dengan jenis kasus terbanyak adalah pengrusakan, penganiayaan dan bentrok antar pendukung. Setelah kerusuhan akibat pemilu di Palopo, Sulawesi Selatan, Mendagri Gumawan Fauzi mengeluarkan pernyataan bahwa telah ada sekitar 50 orang yang meninggal sejak 2005 karena konflik pemilu (“Mendagri : 50 Tewas” ,2013). Di Intan Jaya, Papua, kerusuhan akibat pemilu berujung pada pembakaran kantor pemerintahan dan pemblokiran bandara setempat (“Pilkada kisruh di Intan Jaya”, 2017).

Konflik yang terjadi karena pemilu memang memiliki dampak merusak, mulai dari kerusakan material seperti infrastruktur sampai korban jiwa. Lebih jauh lagi, konflik yang terjadi karena pemilu menimbulkan perpecahan yang terjadi di dalam masyarakat sebagai pemilih yang berpartisipasi di dalam pemilu. Perpecahan dan konflik yang diakibatkan oleh pemilu dapat merusak hubungan sosial di dalam masyarakat, baik itu pertemanan, kolega, dan bahkan mengganggu hubungan internal dalam salah satu unit masyarakat, yaitu keluarga.

Secara singkat, keluarga dapat didefinisikan sebagai dua atau lebih orang yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Keluarga dapat memiliki banyak bentuk, mulai dari *single parent* dengan dua anak atau lebih, pasangan suami istri ataupun hubungan *polyamorous* yang memiliki keturunan, sampai hubungan orangtua-anak yang terjalin sampai bergenerasi (Prins & McBride, 2014). Wamboldt dan Reiss (dalam Segrin & Flora, 2011) mengklasifikasikan definisi mengenai keluarga menjadi 3 aspek, yaitu berdasarkan bentuk, fungsi, dan interaksi. Galvin, Braithwhite dan Bylund (2015) mengemukakan bahwa keluarga secara luas adalah kelompok orang yang memiliki keterikatan dari masa lalu hingga kini, dan interaksi yang berlangsung secara mutual dan saling terhubung dalam hubungan yang saling mempengaruhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah sebuah unit sosial yang memiliki struktur dan hubungan yang erat, di mana setiap peran memiliki ketergantungan pada peran yang lain.

Keluarga, seperti unit makronya yaitu Masyarakat, juga tidak terlepas dari konflik. Konflik dalam keluarga memiliki banyak sekali variasi, seperti konflik antara suami-istri, konflik antara saudara, konflik dengan kakek dan nenek, dan konflik antara keluarga inti dan *extended family* (Borst, 2015). Sedangkan Sillars, Canary, dan Tafoya (2004) menyebutkan bahwa prevalensi konflik dalam keluarga secara berturut-turut adalah konflik antara saudara, konflik orangtua-anak, dan konflik antar pasangan.

Konflik dalam keluarga memiliki dampak yang signifikan terhadap anggota keluarga. Penelitian dari Primasti dan Wrastari (2013) dan Untari, Putri dan Hafiduddin (2018) menunjukkan bahwa konflik keluarga dapat memberikan pengaruh yang besar bagi kondisi psychological well being dari anak, baik secara positif seperti meningkatnya kemandirian (Primasti & Wrastari), atau juga secara negatif seperti kehilangan rasa hormat terhadap orang tua

(Untari dkk, 2018). Lebih jauh lagi, penelitian dari O'Hara, Sandler, Wolchik dan Tein (2018) menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar terjadinya peningkatan perilaku destruktif dan gangguan mental pada anak yang sering terpapar dengan konflik di dalam keluarga mereka (O'Hara dkk, 2018)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi pada hubungan keluarga berpotensi memberikan dampak dalam jangka panjang, dan dampak yang dialami keluarga karena perbedaan pilihan politik sangatlah merusak. Kasus perpecahan keluarga karena adanya perbedaan pilihan politik yang paling anyar adalah kasus pemindahan dua kuburan di Bone, Gorontalo, karena yang telah meninggal adalah seorang pendukung parpol yang adalah parpol rival dari yang didukung oleh keluarga pemilik tanah pemakaman (Detikcom, 2019). Lalu, melalui wawancara yg dilakukan oleh situs berita online *Tirto* kepada salah satu anak dari pendukung aksi bela Islam 212 di Jakarta, responden mengaku bahwa ia mengalami pengucilan dalam keluarganya, karena responden memilih untuk mendukung gubernur petahana (Ahok) dan lebih memandangi insiden Al-Maidah dengan pikiran terbuka ("Kala Pilkada merusak", 2017).

Konflik keluarga yang mempengaruhi hubungan keluarga juga terjadi di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2018 terjadi kerusuhan pilkada yang disebabkan oleh adanya kecurigaan pendukung salah satu paslon, yang menuding bahwa ada manipulasi jumlah suara yang dilakukan oleh paslon lawan, yang juga merupakan petahana Bupati. Kerusuhan tersebut mengakibatkan kerusakan ringan di kantor KPU setempat, dan juga ditahannya dua orang tersangka provokator kerusuhan. Namun sebenarnya kerusuhan itu merupakan puncak dari kekesalan pendukung paslon yang kalah, yang telah memanas semenjak beberapa waktu terakhir sebelum pemungutan suara dilakukan. Meski perpecahan yang dialami masyarakat Alor karena pemilu secara umum memang masih berada pada tahap ringan (seperti saling sindir di media sosial atau di kehidupan sehari-hari), ada beberapa kasus di mana di dalam keluarga inti terdapat perbedaan pilihan politik yang berujung pada konflik nyata seperti tidak saling menyapa dan menjelek-jelekkan anggota keluarga lain. Dampak paling nyata perpecahan ini dirasakan langsung oleh keluarga pegawai negeri sipil (PNS) yang diketahui memiliki pilihan politik yang saling berbeda.

Seperti yang dipaparkan oleh salah seorang anggota timses dari salah satu paslon¹, beberapa waktu setelah hasil pemungutan suara diumumkan, terjadi mutasi jabatan besar-besaran yang dilakukan oleh Bupati petahana. Disebutkan bahwa mayoritas PNS yang mendapat mutasi jabatan tersebut adalah PNS yang disinyalir memiliki pilihan politik yang berbeda. Di antara PNS tersebut, terdapat banyak pasangan suami istri yang diketahui berbeda pilihan politik, yang juga di mutasikan ke tempat jabatan yang berbeda-beda. Kejadian ini sempat kemudian dilaporkan kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan juga Bawaslu ("Mutasi langgar hukum", 2019).

Perbedaan pilihan politik yang menjadi penyebab konflik di dalam rumah tangga akan memberikan dampak jangka panjang yang merusak, baik dalam hubungan antara suami-istri, orangtua-anak, maupun antara keluarga inti dan *extended family*. Dan berdasarkan fakta dan

¹ A. D. adalah salah seorang anggota tim sukses salah satu paslon Pilkada Kabupaten Alor, NTT. Wawancara singkat via telepon, dilakukan pada hari Kamis, 20 Februari 2019.

berita yang telah disebutkan diatas, konflik karena pemilu yang terjadi di dalam sebuah keluarga sering terjadi karena adanya perbedaan pilihan dan pandangan politik di antara anggota keluarga. Berdasarkan paparan diatas, peneliti menemukan adanya suatu isu yang menarik untuk diteliti mengenai konflik pilkada yang mempengaruhi hubungan keluarga, yaitu mengenai komunikasi dalam keluarga yang mengalami konflik karena pilkada.

Komunikasi dalam keluarga menurut McLeod dan Chaffee (dalam Segrin & Flora, 2018), merujuk pada bukan hanya sebuah proses pertukaran informasi, melainkan juga merupakan sebuah proses pembentukan kesepahaman mengenai kenyataan atau disebut juga *Coorientation* (Koorientasi). Pembentukan ini dapat dilihat melalui 3 proses, yaitu *Agreement*, *Accuracy* dan *Congruence*. *Agreement* adalah penilaian bersama orang A dan B mengenai sesuatu, *accuracy* adalah kesamaan antara persepsi orang A dengan penilaian orang B, dan *congruence* adalah kesamaan antara persepsi kedua orang tersebut (Segrin & Flora, 2018). Di dalam konteks keluarga inti, terdapat 4 jenis koorientasi yang sering muncul, yaitu *parents accuracy*, *parents congruency*, *children's accuracy*, dan *children's congruency* (Segrin & Flora, 2018). Kemudian dalam penelitiannya, Ritchie (1991) melontarkan kritik dan evaluasi atas teori Koorientasi dari McLeod & Chaffee, di mana kritik dan evaluasi yang dilakukan Ritchie lalu menjadi versi baru dari teori komunikasi keluarga. Teori ini mengemukakan bahwa dalam komunikasi keluarga, ada dua dimensi orientasi yang selalu muncul secara konstan, yaitu orientasi *conformity* (Konformitas) dan *conversation* (Konversasi). Dimensi konversasi dijelaskan sebagai proses kognisi di dalam komunikasi antara anggota keluarga, yang berkaitan dengan pemberian dan penerimaan informasi dari dua atau lebih pihak, sedangkan dimensi konformitas dijelaskan sebagai proses sosial di dalam komunikasi keluarga, di mana peran dan otoritas diantara anggota keluarga menjadi penting. (Ritchie, 1991). Segrin dan Flora (2011), mengemukakan bahwa beberapa bentuk keluarga (berdasarkan pola komunikasi) dapat terjadi sebagai akibat dari kombinasi dimensi konversasi dan konformitas. Yang pertama adalah *Consensual families*, yaitu keluarga yang berorientasi pada kedua dimensi. Biasanya bentuk keluarga ini didapati di dalam keluarga-keluarga tradisional yang menghargai konversasi, namun menentang pendapat anggota keluarga yang berbeda. Yang kedua adalah *Pluralistic families*, yaitu keluarga yang lebih condong terhadap dimensi konversasi daripada konformitas. Keluarga dengan pola ini adalah keluarga yang menjunjung tinggi kemandirian dalam tindakan tiap anggota keluarganya. Yang ketiga adalah *Protective families*. kebalikan dari bentuk *Pluralistic*, pola ini menentang kemandirian anggota keluarganya. Keluarga dengan pola ini adalah keluarga yang menjunjung tinggi konformitas, dan menolak orientasi konversasi. Yang terakhir, *Laissez-faire families*, adalah bentuk keluarga yang tidak memiliki sifat keterikatan di antara anggota keluarganya. Keluarga dengan pola ini merupakan keluarga yang hampir tidak memiliki dimensi konformitas dan konversasi.

Di Indonesia, Komunikasi keluarga sangat dipengaruhi dengan hirarki otoritas yang dimiliki oleh keluarga tersebut (Riany, Meredith & Cuskelly, 2016). Komunikasi di dalam keluarga tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat di mana keluarga itu menjadi bagian di dalamnya. Menurut Riany, Meredith dan Cuskelly (2016), nilai budaya yang ada di Indonesia turut menjadi faktor dalam proses parenting yang dilakukan oleh orang tua di dalam

sebuah keluarga. Studi yang dilakukan oleh Hakim, Supriyadi dan Yuniarti (2016) juga menunjukkan bahwa nilai budaya dan juga agama yang diterapkan dalam proses parenting di Indonesia dapat mempengaruhi *attachment* yang terjadi di antara orangtua dan anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan dan keberlangsungan komunikasi dalam keluarga di Indonesia tidak terlepas dari nilai budaya yang dianut oleh keluarga tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan dan keberlangsungan komunikasi dalam keluarga di Indonesia tidak terlepas dari nilai budaya yang dianut oleh keluarga tersebut. Berdasarkan paparan diatas, peneliti menemukan adanya suatu isu yang menarik untuk diteliti, yaitu mengenai komunikasi dalam keluarga tradisional yang mengalami konflik karena pilkada.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konflik akibat perbedaan politik dalam pilkada di Alor dapat mempengaruhi komunikasi dalam sebuah keluarga tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru terhadap dampak dari sebuah konflik keluarga yang berlatar belakang perbedaan pilihan politik. Melalui penelitian ini pula peneliti mencoba untuk menggambarkan pola orientasi komunikasi sebuah keluarga tradisional yang terkena konflik karena pilkada. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pelengkap dan referensi bagi penelitian di masa mendatang.

METODE

Partisipan

Penelitian ini melibatkan 2 (dua) partisipan dari anggota keluarga yang mengalami konflik karena pemilu. Keluarga yang dimaksudkan disini adalah keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga besar (*extended family*). Pemilihan partisipan dilakukan dengan cara *snowball sampling*, dimana dilakukan pemilihan partisipan berdasarkan informasi yang didapatkan dari partisipan penelitian yang sudah ada.

Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif ini mengambil pendekatan deskriptif-fenomenologis. Gorgi dan Gorgi (dalam Willig, 2008) menjelaskan pendekatan deskriptif-fenomenologis sebagai sebuah metode untuk mendapatkan data deskriptif mengenai suatu fenomena tertentu. Peneliti menggunakan media elektronik seperti handphone sebagai alat untuk merekam hasil wawancara. Sedangkan yang menjadi fokus fenomenologis adalah pengalaman subyektif partisipan mengenai interaksi dan komunikasi dalam keluarganya.

Hasil wawancara lalu kemudian dialihkan dalam bentuk verbatim yang kemudian dianalisis dengan melakukan penekanan pada penemuan makna psikologis dari pengalaman subyektif partisipan. Proses ini kemudian memunculkan sejumlah kategori dan dari kategori-kategori ini dirumuskan sejumlah tema yang menjadi materi pokok temuan penelitian. Selanjutnya adalah medeskripsikan masing-masing tema, di samping juga memperhatikan keterkaitan antara satu tema dengan tema lainnya. Inilah yang menjadi bagian utama dalam temuan penelitian ini. Sebelum sampai kepada temuan ini, diberikan terlebih dahulu deskripsi dari masing-masing partisipan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Partisipan 1

Partisipan pertama (P1), adalah seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Anak pertama dari keluarga bermarga 'D' ini merupakan anggota suku kampung Pura Harilolong di Pulau Pura, salah satu pulau di Kepulauan Alor. Suaminya adalah pria dari keluarga bermarga 'H', salah satu keluarga keturunan bangsawan di wilayah *chiefdom* (kerajaan suku) Lendola. Sedangkan ayah mertuanya adalah seorang pendenta emeritus yang pernah menjabat sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor semasa pilkada 2014.

Masyarakat Alor merupakan masyarakat patrilinear, oleh karenanya, P1 sebagai warga Alor menyandang nama marga suaminya. Berdasarkan aturan adat yang berlaku, mempelai perempuan diwajibkan untuk meninggalkan keluarganya sendiri untuk hidup bersama keluarga mertua sebagai keluarga baru.

Deskripsi Partisipan 2

Partisipan kedua (P2) adalah seorang pensiunan PNS golongan IV-A yang saat ini berdomisili di Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dia bermarga 'A' dari suku desa Pitumbang di Kecamatan Alor Barat Laut. P2 memiliki istri yang berasal dari keluarga suku Pura Apuri. Keluarga suku ini merupakan keluarga yang serumpun dengan keluarga dari calon bupati dari pasangan calon 'Amin' dalam dua pilkada berturut-turut, yakni pilkada 2014 dan 2018.

Interaksi dengan keluarga dan lingkungan menjelang pilkada

Segera setelah menikah, P1 menuturkan bahwa dia bersama suami harus bergumul untuk memperoleh penghasilan tetap. Dalam hal ini, P1 menuturkan bahwa ia turut menyaksikan kerja keras dari ayah mertuanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan juga merenovasi rumah tempat tinggal mereka. Menurut P1, kenangan akan sosok ayah yang sangat bertanggungjawab akan terus berbekas dalam ingatannya, meski ayah mertuanya telah menghembuskan nafas terakhirnya secara mendadak pada tahun 2015.

"... rumah ini saja kerjanya dengan keringat bapak sendiri, karena bahan kayu ini punya kami dari kebun, sedangkan yang lain dibeli di toko dan itupun masih hutang..."

Berpindah ke dalam keluarga baru membuat P1 harus berusaha untuk menyesuaikan diri dalam keluarga tsb. Hal ini mengakibatkan kontak dengan keluarga kandungnya menjadi amat sangat berkurang. Namun menurut P1, hal ini bukan suatu masalah. Menurutnya, karena natur dari pernikahan di Alor, maka secara adat ia bukan lagi merupakan anggota keluarga kandungnya, melainkan telah menjadi anggota keluarga suaminya.

"... kalau sudah menikah lalu pulang ke rumah sendiri itu seperti susah, begitu. Karena... Bagaimana ya, mungkin karena tradisinya sudah begitu, kalau sudah menikah, lebih (cenderung) ke rumah suami."

Oleh karena itu, ia tidak lagi diwajibkan untuk turun tangan dalam keseharian keluarga kandungnya, terkecuali dalam kondisi khusus seperti acara keluarga atau acara adat. Meski demikian, ikatannya dengan keluarga kandung tidak hilang ataupun berkurang. P1 juga menilai ia memiliki ikatan keluarga yang cukup erat dengan keluarga besar dari suku Pura. Berpindah

tempat tinggal dari rumah keluarga kandung ke rumah keluarga suaminya juga menyebabkan P1 hanya berinteraksi dengan warga yang tinggal di sekitar keluarga suaminya, dan menurut pengakuan P1, ia memiliki relasi yang baik dengan para tetangga yang ada di lingkungan sekitar rumahnya.

Berbeda dari P1, ketika saat memasuki Pilkada 2018, P2 telah menjadi pensiunan PNS selama kurang lebih tiga setengah tahun. Setelah menyelesaikan masa baktinya sebagai PNS, ia kemudian menghabiskan hari-harinya dengan membuat berbagai macam furnitur rumah dari kayu dan bambu. Kegiatan ini di samping sebagai hobi, juga merupakan mata pencaharian dari P2 setelah pensiun. Interaksi dengan keluarga dan lingkungan berjalan dengan biasa. Namun, ketika memasuki pilkada 2018, P2 mengalami perubahan sikap yang drastis mengenai pilihan politiknya dan sikapnya terhadap pilihan politik keluarganya. Ketika masa kampanye berlangsung, subjek memberi ultimatum terhadap sikap politik keluarganya; mereka harus memilih pilihan politik yang sama dengannya, atau mereka akan diusir.

“Saya memang sempat bicara dengan anak laki-laki dan istri, kalau kalian pilih (paslon ‘Amin’ lalu ‘Amin’ kalah, kalian silahkan tinggal di gunung. Kalian tidak bisa tinggal disini.”

Perubahan ini memiliki anteseden yang terjadi pada beberapa waktu sebelumnya. Pada bagian selanjutnya, akan dijelaskan beberapa hal penting yang mempengaruhi sikap P2 dalam perubahan pilihan politik yang berujung pada ancaman yang ia lontarkan kepada keluarganya tsb.

Perbedaan Pilihan Politik dalam Keluarga dalam Pilkada

P1 pertama kali terlibat dengan kegiatan seputaran pilkada pada tahun 2014, ketika ia ikut menjadi tim partisan dari pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) ‘Siyo Mama’. Pilihan politik P1 ini ditanggapi dengan keberatan oleh keluarga kandungnya, karena pada perhelatan pilkada kala itu, terdapat 3 calon bupati yang berasal dari pulau Pura, masing-masing merupakan calon dari paslon ‘Siyo Mama’, paslon ‘Seniman’ dan paslon ‘Amin’. Melalui pertemuan adat, keputusan diambil oleh masyarakat Pura untuk mencegah perpecahan dalam mendukung paslon dari pulau Pura. Hasil dari pertemuan itu mendeklarasikan dukungan mayoritas suku Pura kepada paslon ‘Amin’, paslon dengan indikasi kemenangan kuat yang pada akhirnya memenangkan pilkada pada tahun tsb. Meski dukungan mayoritas suku Pura diberikan pada paslon ‘Amin’, dukungan suara minor tetap diperbolehkan untuk cabup dari paslon lainnya yang berasal dari pulau Pura. P1, yang sadar betul mengenai pembagian dukungan tersebut, malah lebih memilih untuk mendukung paslon ‘Siyo Mama’, paslon yang sering disebut sebagai ‘generasi tua’ oleh keluarga besar Pura. Selain itu, saudara kandung dari P1, sebenarnya adalah seorang anggota tim sukses (Timses) dan juru kampanye dari paslon ‘Amin’ selama 2 periode berturut-turut. Keluarga kandung P1, seperti keluarga besar Pura, memperdebatkan pilihan politik P1, namun ia memiliki dua alasan utama yang ia rasa penting dalam proses menentukan pilihan politiknya.

Pertama, karena alasan kekeluargaan. Keluarga D, keluarga kandung P1, adalah bagian dari keluarga suku kampung Pura Harilolong. Lebih spesifik lagi, Keluarga D merupakan anggota dari rumpun keluarga yang sama dengan keluarga calon bupati dari paslon ‘Siyo Mama’. Calon

bupati tsb juga adalah salah kepala keluarga dari keluarga 'P', salah satu rumpun keluarga di suku kampung Pura Harilolong. Menurut tatanan keluarga suku adat, calon bupati tsb berpangkat 'paman' terhadap P1. Menurut P1, di luar dari struktur keluarga suku, kedekatan internal dari keluarga D dengan keluarga P telah terjalin sejak nenek moyang mereka:

"Lebih akrabnya ke (keluarga) P. Jadi makanya saya pilih beliau. Bahkan ketika ada yang bilang, 'Orang sudah jaman pesawat kok masih pakai kapal ferry,' itulah-istilah yang saya tidak mengerti."

P1 juga menuturkan bahwa semenjak kecil, ayah dan ibu kandungnya sering membawanya berkunjung ke kediaman keluarga 'P' ketika ada acara-acara adat atau acara-acara kekeluargaan. Hal ini menurut P1 adalah salah satu alasan mengapa ia mendukung calon bupati dari paslon 'Siyo Mama'. Pilihannya ini ditentang oleh saudara kandungnya dan keluarga kandungnya, namun P1 tetap bersikukuh. Tetapi, meski keluarga kandungnya menentang pilihan politik dari P1, mereka tetap dengan tenang dan kepala dingin menanyakan alasan dari sikap itu dan tetap menghargai pilihannya, sebuah sikap yang disyukuri oleh P1 dimiliki oleh keluarga kandungnya:

"Pertama saya bersyukur ya, karena keluarga diatas (keluarga kandung, tempat tinggal mereka berada di kampung bagian atas) itu selalu bersikap tenang ketika ada masalah. Selalu tanggapi dengan kepala dingin, dan saya bersyukur untuk itu"

Kedua, P1 mengalami sendiri bagaimana dirinya dan keluarga suaminya mengalami perlakuan yang tidak enak karena perbedaan pilihan politik. P1 menuturkan, pada satu momen dalam masa kampanye pilkada 2014, paslon 'Amin' pernah melakukan kampanye di desa Lendola, di lokasi yang dekat dengan kediaman keluarganya. Pada kampanye tsb, juru kampanye (jurkam) dari paslon 'Amin' sempat mengutarakan kalimat-kalimat yang bernada tuduhan kepada ayah mertua dari P1, yang kala itu merupakan Ketua KPU kabupaten Alor. P1 menuturkan bahwa tidak hanya ia dan keluarganya, namun beberapa warga di situ pun merasa tidak senang atas kalimat-kalimat tsb. Beberapa waktu sesudahnya, menjelang minggu pemilu, keluarganya menerima teror berupa pesan singkat dan telepon yang berisi tuduhan bahwa ayah mertuanya telah menerima uang suap bernilai puluhan juta dari paslon yang merupakan lawan dari paslon 'Amin'. Pada masa kampanye ini pula, P1 mengalami diskriminasi dan sindiran dari anggota keluarga besarnya. Dalam setiap acara keluarga yang ia hadiri, ia selalu mendapat ejekan dan sindiran yang bernada sinis dari keluarga besarnya. Dikarenakan hal tsb, ia merasa tidak aman ketika menghadiri acara yang berkaitan dengan keluarga suku Pura. Namun dalam menghadapi hal ini, P1 merasa ia tidak perlu menanggapi setiap sindiran dan ejekan dengan frontal. Ia merasa ia dikuatkan karena ia tahu ia memiliki hak untuk memilih pilihan yang berbeda dalam pilihan politiknya dan juga, sebagai anak, ia merasa memiliki kewajiban untuk membela wibawa dan nama baik ayah mertuanya yang telah diteror oleh oknum yang tidak bertanggungjawab:

"Telepon itu hanya sekedar mau bilang 'bapak mertua kamu itu sudah makan uang suap belasan-puluhan juta', begitu. Tapi saya tidak tahu itu siapa. Saya tanya siapa, mereka bicaranya cuma begitu-begitu saja. Padahal kalau mau dibilang, saya ini orang Pura juga. Saya tidak terima kalau kamu jatuhkan bapak mertua saya, secara pribadi saya"

tidak terima. Jadi dari situ. petahan maju lagi yang kedua kali, saya tetap di pendirian saya, saya bela bapak mertua saya...”

Alasan lain P1 memilih pilihan politik yang berbeda dengan keluarga besar dan keluarga kandungnya, adalah persepsinya terhadap jurkam dan timses dari para paslon. Menurutnya, beberapa timses dan jurkam dari paslon ‘Amin’ terkadang bersikap ‘sombong dan angkuh’, sebuah sikap yang ia anggap berlawanan dengan tujuan kampanye yang mempromosikan calon pemimpin yang merakyat. P1 menjelaskan, bahwa ketika pilkada pada tahun 2018, meski ia telah melupakan semua pengalaman buruk dan sikap yang tidak baik dari keluarga besarnya, sikap dari para timses dan jurkam dari para paslon membuatnya ragu untuk memilih paslon tsb.

“Iya, meninggikan diri. Sedangkan kami ini masyarakat kecil, yang kami mau itu kalau ada yang mau bicara dengan kami ya pakai bahasa sehari-hari seperti kita begini, bicara sederhana dan biasa dengan kami, merangkul kita, begitu. Kalau ini mereka bicaranya, seperti semuanya itu mereka bisa. Itu yang saya kurang suka.”

Sementara itu, ketika Pilkada 2014 berlangsung, P2 sudah menjadi pensiunan PNS yang telah bekerja pada instansi pemerintahan selama puluhan tahun. Ia telah bekerja dalam situasi kantor yang berbeda beda, termasuk juga mengalami pergantian jabatan. Hal ini membentuk persepsinya mengenai bagaimana orang-orang yang ia kenal berubah sifat ketika menduduki jabatan tertentu;

“Kan begini... Setiap pejabat apa saja, pangkat apa saja, sebelum dia naik ke jabatannya, dia pasti kenal dengan kita. Begitu dia naik jabatan atau dapat pangkat itu, semuanya dia sudah lupa. Kita jalan pun dia tidak akan (menyapa), begitu. Itu masalahnya.”

Pengalamannya ini membuatnya percaya bahwa politik pada dasarnya adalah praktek yang tidak jujur, dan merupakan sebuah kontestasi yang sengit dari antara dua kubu yang berbeda kepentingan;

“Memang dalam aturan undang-undang itu ada, tapi kebanyakan, kasarnya dibilang licik. Saling menipu. Contohnya saya mau tipu kamu seperti apa, sampai saya bisa dapat sesuatu dari kamu. Kasarnya begitu. Ya sifatnya memang begitu. Istilahnya barang yang tidak ada bisa ada, barang yang ada bisa tidak ada.”

Dikarenakan pandangan ini, P2 merasa perpindahan kekuasaan dari bupati yang lama kepada bupati yang baru bukan merupakan hal yang wajar dan seharusnya terjadi. Dan karena pemahamannya akan natur dari pilkada yang seperti itu, ia juga merasa bahwa perpecahan di dalam keluarga akibat perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar terjadi, meski ia juga mengakui bahwa pilihan politik adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan kepada orang lain.

Antara Keluarga dan Politik

Pada perhelatan Pilkada 2018, hanya ada dua paslon yang bersaing dalam pikada tsb. Calon bupati yang berasal dari pulau Pura hanya ada satu, sehingga hal ini mengakibatkan suara seluruh masyarakat pulau Pura terkonsentrasi untuk memilih paslon tsb. Namun, dikarenakan afiliasi politik yang berseberangan dengan keluarga Pura yang telah ditunjukkan pada pilkada sebelumnya, P1 menghadapi kecurigaan dari keluarga kandungnya terhadap pilihan politiknya pada pilkada kali ini. Keluarganya menentang dengan keras pilihan politiknya yang berlawanan

dan berusaha mempengaruhi P1 untuk mengikuti pilihan politik yang mereka ambil, yaitu pilihan politik yang juga diambil oleh hampir seluruh masyarakat Pura. Namun, menurut P1, ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Ia merasa pilihan pribadinya adalah haknya yang tidak bisa diganggu. Ia juga menjelaskan pada keluarga kandungnya bahwa meski nanti pilihan politiknya adalah calon bupati yang berbeda suku dengannya, bupati yang terpilih nantinya akan menjadi figur pemimpin bagi semua orang, bukan hanya suku Pura saja. Keluarga kandungnya menerima penjelasannya namun tidak dapat dipastikan apakah mereka menerima pilihan politik dari P1:

“Keras. Mereka langsung tidak suka, sampai bahkan marah-marah. Mereka bilang, ‘jangan macam-macam. Kamu jangan kerja macam-macam untuk orang lain, harus kerja untuk bapak AJ’. Tapi dalam hati saya bilang, kalian bicara saja terus, dalam hati ini pilihan pribadi kok. Saya tetap di pendirian saya.”

Namun, keluarga besar suku Pura memiliki sikap yang berbeda. Seperti yang diceritakan P1, beberapa minggu setelah memasuki masa kampanye, ia sempat mengikuti acara syukuran keluarga besar Pura di salah satu kediaman anggota suku Pura. P1 mengakui dalam acara itu, ia merasa dikucilkan dengan sikap keluarga Pura yang menghindari dirinya, dan secara langsung menuduhnya sebagai partisan dari Paslon lawan:

“Iya, kalau baru datang. Misalnya saya baru datang, kalau mereka sedang kumpul lalu saya muncul, mereka seperti... ‘Itu, pendukung ‘Intan’ datang tuh’. Nah begitu. Respon awalnya begitu. ‘Wih orangnya Intan datang, hati-hati’, begitu.”

P1 sadar bahwa sikap itu ditujukan kepadanya. Awalnya, P1 menanggapi sikap itu sebagai candaan. Namun, setelah beberapa kali mengalami hal yang sama pada acara keluarga lainnya, ia memutuskan untuk tidak menghadiri kegiatan-kegiatan keluarga selama masa kampanye, agar menghindari kalimat-kalimat yang ia anggap bisa menyakiti hatinya.

“Iya, itu karena saya menghindar, takut nanti kalau hadir ada kata-kata yang bisa bikin sakit hati. Nanti pas selesai pemilu, sudah diumumkan pak Amon yang menang baru kalau diundang saya selalu hadir.”

P1 menilai, sikap seperti itu harus dihadapi dengan tenang. Ia juga menilai bahwa sikap seperti ini hanya ada ketika pilkada berlangsung dan merupakan bagian dari euforia pilkada, sehingga tidak perlu ditanggapi secara serius. P1 juga merasa, sikap dari keluarga besarnya sebenarnya mengandung persuasi kepada dirinya untuk ikut mendukung paslon yang mereka dukung.

“Itu... mungkin menurut saya ya, mungkin mereka mau kasih tau ke kami supaya kita juga berpaling ke mereka, bergabung dengan mereka, cari massa. Tapi kalau menurut saya, entah dia mau pakai pesawat apapun, kita tetap dengan ferry pelan-pelan juga tetap maju. Lalu kenapa saya tetap dengan pak S, karena pak S ini sudah tua, jadi kan lambat, tapi saya tetap bersikeras.”

Sebaliknya, P2 sebenarnya adalah pemilih paslon ‘Amin’ ketika paslon tsb memenangkan pilkada 2014. Perubahan pilihannya yang mendadak berpindah dari paslon petahana kepada paslon ‘Intan’ terjadi karena 2 hal. Yang pertama, ketika istrinya sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Istri P2 adalah anggota suku Pura Apuri yang serumpun dengan keluarga calon bupati dari paslon 'Amin.' Dalam struktur keluarga adat Pura, istri partisipan ini memiliki pangkat setara dengan ibu atau tante dari calon bupati tersebut. Namun ketika istrinya harus masuk rumah sakit kondisi darurat kesehatannya memburuk, calon bupati tidak menyempatkan diri untuk menjenguk 'tantenya' ini walau pun sebelumnya telah berjanji kepada P2. Sang calon bupati malahan melakukan kunjungan keluar kota tanpa memberitahu P2. Keesokan harinya P2 berusaha untuk menemui calon bupati ini di rumah dinas, namun didapatinya gerbang tertutup. Kejadian semacam inilah yang dirasakan sangat mengecewakan oleh P2 dan selanjutnya dia menjadi tidak mantap untuk memilih bupati petahana ini dalam pilkada selanjutnya.

"Iya pergi. Saya kesana dia sudah pergi. Lalu yang kedua saya kesana, pas beliau baru dari, dari kecamatan, baru sampai. Baru masuk. Dia masuk. Lalu Pol PP tutup pintu, lalu dia pesan ke saudara saya yang Pol PP juga disitu, dia pesan katanya, 'Kasih tau Kakek D, besok saja kesini'. Itu, makanya mulai dari situ saya berhenti. Saya tidak datang lagi tempat itu. Akhirnya setelah itu saya jadi ragu-ragu, jadi bimbang juga. Jadi bingung ini saya mau lari kemana ini?"

P2 merasa kecewa karena meski ia memahami beratnya tugas dan tanggungjawab dari seorang bupati, bupati seharusnya menepati janji untuk menemuinya. Ia juga merasa kecewa karena ia merasa bahwa bupati tidak menghiraukan hubungan kekeluargaan yang ia miliki antara dirinya dan istri dari P2, suatu hal yang disesalkan oleh P2;

"Rasa kecewa saja. Kamu (bupati) memang, tapi istri saya ini, nenek ini kan kalian panggil mama kalian juga, begitu... Kecewanya begitu. Kecewanya begitu."

Sikap yang telah diperlihatkan oleh bupati dirasakan oleh P2 sebagai puncak kekecewaan dalam mendukung paslon yang berasal dari keluarga suku istrinya. Kekecewaan lainnya juga dialami olehnya dalam pileg 2014. Dia diminta untuk menjadi juru kampanye pemilihan legislatif seorang caleg yang berasal dari daerah pemilihan desa asal P2 sendiri. Sedangkan caleg ini berasal dari keluarga yang serumpun dengan istrinya, yakni suku dari Pura Apuri. Oleh karena kesamaan rumpun keluarga inilah ia lalu menyanggupi untuk menjadi juru kampanye dan menghubungkan antara tetua desa asalnya dan dengan caleg tersebut. Ia merasa telah menjalankan peran yang besar yakni sebagai jembatan antara desanya dan caleg ini dan hal itulah yang membuat caleg tersebut unggul dalam perolehan suara. Namun, P2 menuturkan bahwa setelah pilkada selesai, dia dilupakan oleh caleg yang dia dukung ini.

"Artinya berterima kasih itu, kalau ada acara syukuran setidaknya undang saya. Saya tidak cari nama, tapi itu artinya menghargai saya. Lagipula saya kan bukan orang asing, Istri saya kan dari kampung mereka. Kamu yang naik jadi anggota dewan kan dari kampung yang sama. Kenapa kamu tidak menghargai saya? Sebelumnya kalian sering datang kesini tapi sesudahnya lupa sama sekali. Itu yang bikin saya agak kecewa tapi sebenarnya ya tidak apa-apa. Kamu kan sudah menang, memang berapa uang kalian kasih (untuk) saya, kan tidak juga.."

P2 menuturkan, setelah pileg berakhir, caleg yang telah ia bantu tersebut mengadakan pesta syukuran untuk merayakan kemenangannya. Namun P2, yang merasa memiliki kontribusi

sebagai perantara kampanye dari caleg itu, tidak mendapat undangan sama sekali. Ia merasa kecewa karena menurutnya, ia seharusnya dihargai sebagai salah satu orang yang membantu caleg tersebut memenangkan pileg;

“... Jadi waktu pemilihan selesai waktu itu, dia di Pura ikut pemilihan, Jadi pas perhitungan suara sudah selesai, saya ditelepon. Katanya ‘Pak , saya sudah selesai, perhitungan sudah selesai, saya berhasil, saya lolos di pura juga’. Saya bilang sudah, oke, yang penting sudah berhasil ya sudah. Saya kecewanya, kenapa diau setelah itu syukuran tidak kasih tahu saya. Itu yang saya kecewa.”

Hal kedua yang menjadi alasan berubahnya pilihan politik P2 adalah rumor keterlibatan adik kandungnya sebagai tim kampanye dari paslon ‘Intan’. Adiknya adalah simpatisan dari paslon ‘Intan’ yang telah menjadi lawan kuat dari paslon ‘Amin’ semenjak pilkada 2014. Adik dari P2 ini adalah seorang lulusan S2 dari fakultas pertanian di sebuah universitas negeri di Makassar, dan bekerja sebagai seorang staff pada suatu dinas di Pemkab Alor. Istri dari adiknya adalah anggota dari keluarga yang serumpun dengan calon bupati dari paslon ‘Intan’. Ia juga dirumorkan menjadi anggota tim kampanye dari ‘Intan’. Karir adiknya yang macet karena menjadi pendukung rival dari paslon petahana menjadi pendorong P2 untuk mengubah pilihan politiknya, dengan harapan bahwa bupati dan wakil bupati yang baru akan memberi adiknya jabatan yang sesuai dengan gelar akademis yang ia miliki;

“... Dari awal mereka sudah tergabung dalam timses. Sampai-sampai, adik saya ini kan sekolahnya sampai S2, tapi tidak pernah dapat jabatan, karena selalu berlawanan politik. Jadi dia S2 pertanian tapi tidak pernah dapat jabatan sampai sekarang. Tidak ada, Cuma staff biasa. Jadi perhitungannya, kalau kami dukung ‘Intan’ ini naik, dengan sendirinya adik saya bisa dapat jabatan.....”

P2 sebenarnya telah menyarankan adiknya untuk berpindah haluan politik agar karirnya bisa menanjak. Ia sebagai kakak merasa gelar akademis yang sudah di raih adiknya dengan susah payah tidak boleh menjadi sia-sia hanya karena idealismenya dalam pilihan politik ;

“Susah itu. Lalu dia dapat S2 di Makassar, pertanian. Tapi datang kesini malah tidak dapat jabatan. Dari beberapa tahun setelah pulang. Dia memang dari awalnya dengan istrinya sudah berada di kubu intan. Jadi mereka diajak dengan berbagai cara, sampai saya sendiri yang bilang. Saya bilang ‘Wako (panggilan adiknya), kalau tidak apa-apa, kamu dan istri balik haluan saja, karena ini kalian lawan politik, lawan arus, kamu sekolah jauh-jauh juga percuma, tidak ada guna.”

Dua hal diatas kemudian menjadi alasan utama P2 untuk berpindah afiliasi dan pilihan politik pada pilkada berikutnya, yaitu Pilkada 2018. Keluarganya sendiri sebenarnya adalah pendukung paslon ‘Amin’ karena hubungan kekeluargaan yang dimiliki oleh istrinya. P2 yang sudah terlampau kecewa kemudian mengeluarkan ancaman akan mengusir keluarganya jika mereka memilih paslon petahana saat. Ia sebenarnya juga sempat mengikuti kampanye dari paslon ‘Intan’ beberapa waktu sebelum pilkada. Pada kampanye itu, salah satu juru bicara dari paslon ‘Intan’ mengenalinya dan kemudian menyapanya. Hal ini kemudian dirasakan olehnya sebagai bentuk penerimaan dirinya oleh timses ‘Intan’ sebagai simpatisan dari paslon tersebut.

Hal ini turut menguatkan sentimen dalam dirinya untuk mengubah pilihan politik pada pilkada kala itu ;

“Iya. Jadi waktu itu dia lihat saya di luar. Dia suruh adik saya panggil saya. ‘Panggil pak itu kesini’. Jadi saya kesana lalu dia bilang, ‘Kamu ini saya lihat (kok) diluar. Duduk disitu.’ Saya bilang ya sudah, saya ikut saja. Tapi ya saya bilang, saya kasihtau ke SP (juru bicara timses Intan), saya bilang mungkin saya balik haluan ke Intan. Dari Amin saya ke Intan. Dia senang pas saya bilang begitu.”

Relasi Keluarga Pasca Pilkada

Setelah Pilkada 2018 berakhir, P1 menceritakan bahwa ia sempat sungkan untuk bertemu lagi dengan anggota keluarga besarnya. Hubungan kekeluargaan yang ia miliki dengan anggota keluarga besarnya memang tidak ia lupakan, namun ia masih merasa takut akan respon yang diberikan oleh keluarga besarnya. Meski demikian, menurut P1, interaksi dengan keluarga besarnya berangsur normal setelah Pilkada berakhir.

“Iya, pertama ketemu itu rasanya tidak enak ya, seperti, wah kalau bertemu jangan-jangan saya tidak disapa, begitu. Dengan timsesnya ini kan masih keluarga juga, dengan timnya yang lain tidak terlalu tapi yang masih keluarga itu kalau ketemu selalu berpikir ‘saya bakal disapa tidak ya’, begitu padahal, kesana juga biasa-biasa saja. Tidak ada rasa dendam, tidak ada.”

P1 sempat merasa dicurigai oleh keluarga kandungya, namun ia merasa itu hal yang wajar dikarenakan afiliasi politik yang ia ambil pada pilkada sebelumnya.

“Sebenarnya kayak... kalau saya keluar rumah mau kemana, mereka seperti curiga begitu. Jangan sampai saya membantu kandidat lain, saya ditanya-tanya juga. Tapi meski begitu saya bilang, saya ke pasar, ke tempat lain. Kadang mereka bilang ‘itu pasti baru pulang pertemuan’ kalau saya pulang rumah (pakaiannya) rapi.”

Keluarga kandungya sendiri selalu mengingatkannya untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik pada pilkada tahun itu. Ia menjelaskan, setelah pilkada, ia sempat bertemu dengan keluarga besarnya yang merupakan anggota timses atau partisan dari paslon lawan. Meski awalnya sungkan dan takut, ia mendapati bahwa setelah masa pilkada berakhir, hubungan kekeluargaan dengan keluarga besarnya berangsur normal.

Sebaliknya, ketika P2 mengalami perubahan pilihan politik, ia melontarkan ancaman kepada keluarganya agar tidak memilih paslon petahana. Keluarganya sempat terkejut dengan pernyataan tersebut, namun berusaha untuk tidak menanggapi, karena posisinya sebagai kepala keluarga. Keluarganya juga beranggapan bahwa ia hanya menggertak saja ketika ancaman itu dilontarkan;

“Tidak, mereka tidak tanggapi. Saya hanya bicara lepas saja, sudah, sudah selesai ya sudah.”

Menurut P2, ancaman itu sebenarnya mengandung maksud untuk mengajak keluarganya untuk memilih paslon pilihannya. Pemahamannya mengenai natur politik seperti yang disebutkan diatas mendorongnya untuk melontarkan ancaman tersebut. Meski demikian, ia sebenarnya masih menyimpan rasa segan terhadap paslon petahana dan pemilihnya. Maka dari

itu, ketika mendekati hari pilkada, ia menyarankan kepada anggota keluarganya untuk membagi suara mereka, masing-masing untuk kedua paslon;

“Itu kan harus bicara begitu (mengancam mengusir keluarganya). Tapi, mereka tetap bertahan. Mereka bilang ‘apapun yang terjadi, Amin ini pilihan kami jadi kami tidak berpindah’. Saya bilang terserah, yang penting saya bagaimanapun saya tetap di Intan. Kalau saya sudah berpindah ya sudah, itulah. Jadi mereka tetap di Amin, kita bagi-bagi. Artinya supaya kita juga ya perasaan ya, menghargai orang, jadi biar kita bagi-bagi. Jadi biar mereka di Amin, saya di Intan.”

Setelah pilkada selesai dan paslon petahana memenangkan pilkada, nyatanya P2 tidak mengusir keluarganya. Ia beranggapan, apa yang ia katakan pada waktu itu hanya merupakan candaan bagi keluarganya. P2 merasa bahwa apa yang ia katakan pada waktu itu hanya sebuah ledakan emosi yang terkultivasi akibat kekecewaannya terhadap para paslon dan caleg yang ia dukung. Keluarganya sendiri tidak mengungkit lagi permasalahan itu setelah masa pikada berakhir;

“Tidak ada. Sudah selesai juga, itu ‘kan juga hanya bicara lepas saja. Jadi tidak ada persoalan. Kecuali ada pihak-pihak yang mengungkit, baru harus jelaskan, ini apa sih sampai harus jadi masalah. Ini kan didalam rumah, jadi kalau selesai ya selesai saja.”

PEMBAHASAN

Kekerabatan dan Kekeluargaan dalam Budaya Alor

Budaya masyarakat Alor, seperti kebanyakan budaya lainnya di Indonesia, menerapkan sistem keluarga patriarkal. Di dalam budaya keluarga suku Alor yang patriarkal, penghargaan terhadap ayah dan keluarga dari sang ayah disimbolkan dengan memakaikan marga atau *fam* dari sang ayah kepada anak-anaknya. Keluarga suku adalah salah satu bentuk dari *extended family* yang berada di *setting* masyarakat tradisional. Corak kekerabatan seperti ini menjunjung tinggi relasi antara *nuclear family* dan *extended family* (Al-Ghannin, 2013). Sebagai akibat dari bentuk *kinship* seperti ini, keluarga suku di Alor kebanyakan menerapkan *patrilocal*, yaitu pola tempat tinggal yang berlokasi dekat atau bersama dengan keluarga sang suami (Peoples & Bailey, 2011). Hal ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang dialami oleh kedua partisipan. P1 sebagai seorang perempuan yang menikah dengan suaminya, berpindah tempat tinggal ke rumah keluarga sang suami, dan wajib menjadi bagian dalam keseharian keluarga suaminya. Berbeda dengan P1, P2 setelah menikah dan menjadi kepala keluarga kemudian membawa istrinya keluar dari pulau Pura untuk tinggal bersamanya di Kalabahi.

Kedua partisipan, meski berada di dalam tingkatan *extended family* yang berbeda, menunjukkan keterikatan dan hubungan kekeluargaan yang bisa terjadi antara anggota keluarga dari *extended family* di dalam sebuah masyarakat tradisional. P1 sebagai anak yang terlahir di dalam keluarga besar suku Pura, memiliki ikatan keluarga dengan sukunya yang disebut sebagai *unilineal descent*. *Unilineal descent* adalah bentuk *kinship* di mana anggota keluarga suku/klan yang berkaitan memiliki satu atau lebih nenek moyang yang sama, lelaki atau perempuan (Peoples & Bailey, 2011). Sedangkan P2, sebagai individu yang bukan merupakan anggota suku Pura, mendapatkan ikatan non-*unilineal* dengan suku Pura melalui pernikahan yang bersifat *exogamy* (pernikahan ke luar suku) dengan istrinya yang diwakilkan dengan *belis/mas kawin*. Pernikahan di masyarakat suku di Alor merupakan sesuatu yang dianggap amat sangat penting, selain juga sebagai proses penyatuan dua keluarga, pernikahan dilihat sebagai proses penyatuan

dua suku yang berbeda, dan sekaligus menjadi sebuah ajang pembuktian harga diri bagi kedua suku tersebut, dimana semakin tinggi sebuah permintaan *belis* dari suatu yang dipenuhi, semakin tinggi harga diri dari suku itu (Itta, 2016).

P1 dan P2 merupakan anggota dari keluarga dari *extended family* mereka masing-masing yang masih memegang nilai-nilai budaya dan adat di dalam masyarakat Alor dengan sangat ketat. P1 sebagai seorang anak, merupakan anggota suku dari keluarga besar suku Pura. P2 merupakan kepala dari keluarga yang merupakan anggota dari keluarga suku Pura dan juga suku Otvai. P1 mengakui bahwa hubungannya dengan keluarga besarnya cukup erat, terlebih pada keluarga besar yang serumpun dengan keluarga kandungnya, yaitu paslon pilihannya. P2, sebagai kepala keluarga, memiliki istri yang berasal dari keluarga besar suku Pura. Dari hasil wawancara, dapat dilihat bahwa hubungan diantara dirinya dan keluarga besar dari istrinya sebagian besar bersifat politis, di mana ia sempat diminta untuk menjadi juru bicara dalam kampanye pilkada dan pileg dari paslon dan caleg yang berasal dari keluarga suku istrinya.

Keluarga dan Perbedaan Pilihan Politik

Dalam memilih paslon dalam pilkada, P1 mengakui bahwa sikapnya dipengaruhi oleh familiaritas yang ia rasakan pada paslon tersebut. Hal ini dikarenakan ia memiliki hubungan yang erat dari sejak kecil dengan S, paslon yang juga merupakan kepala keluarga dari keluarga P, keluarga yang memiliki ikatan *kinship* dengan keluarga kandung dari P1. Familiaritas dalam memilih paslon merupakan sebuah perilaku pemilihan (*voting behaviour*) yang terjadi ketika pemilih merasakan kedekatan terhadap paslon, baik secara pandangan maupun secara tampilan fisik. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Bailenson, Iyengar dan Lee (2008) menunjukkan bahwa kedekatan pemilih dengan kandidat yang dipilih dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ras, gender, pandangan politik dan identitas sosial. Penelitian yang sama juga menunjukkan adanya pengaruh kuat antara familiaritas wajah dengan kans terpilihnya paslon tsb, disamping juga bahasa tubuh dan interaksi sosial yang mereka lakukan (Bailenson, Iyengar & Lee, 2008).

Berbeda dengan P1, P2 berpindah pilihan paslon setelah adanya beberapa kejadian yang mengubah pemikirannya. Menurutnya, paslon dan caleg yang ia bantu dalam kampanye mereka tidak menunjukkan sikap terima kasih kepadanya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Parker dan Isbell (2014), ditemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif antara perasaan negatif seperti kecewa, marah dan takut dengan perpindahan pilihan politik di dalam suatu kontestasi pemilihan politik. Hal ini dapat dimungkinkan karena dalam kondisi emosi yang negatif, pemilih cenderung tidak mau mendengarkan dan memproses informasi yang netral mengenai paslon yang tidak ia sukai. Lebih jauh lagi, penelitian yang dilakukan oleh Valentino, dkk., (2011) menunjukkan hal yang serupa, di mana kampanye dari paslon dalam pemilihan politik dapat meng-*trigger* perasaan negatif seperti kesal dan takut pada simpatisan paslon lawan.

Kedua partisipan, sebagai anggota dari keluarga yang masih memegang erat nilai kekeluargaan yang melekat dalam budaya Alor, seharusnya memilih paslon yang memiliki ikatan kekeluargaan/*kinship* dengan mereka pada perhelatan Pilkada. Namun P1 dan P2 memilih paslon yang berbeda dengan yang dipilih oleh keluarga/*kinship* mereka. Pada pilkada sebelumnya, P1 memilih paslon yang dianggap tidak memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat dalam keluarga sukunya, namun memiliki ikatan dengan keluarga kandungnya (*unilineal descent*). Pemilihan ini menurutnya merupakan murni karena ikatan kekeluargaan yang ia rasa lebih kuat terhadap paslon tersebut. Meski ia memiliki alasannya dalam memilih paslon tsb, keluarga kandungnya yang juga memiliki ikatan dengan paslon pilihannya tidak memilih paslon yang sama, dan malah memilih paslon yang disepakati bersama oleh masyarakat adat suku Pura.

Pilihan P1 ditentang oleh keluarga kandungnya dan keluarga besarnya. Dalam hal ini, P1 mengalami *peer pressure* dari keluarga kandung dan keluarga besarnya untuk memilih paslon yang sama dengan mereka. *Peer pressure* di dalam konteks politik dilihat sebagai suatu usaha untuk melakukan persuasi kepada seorang individu untuk memilih preferensi politik yang sama dengan kelompoknya. Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Blais, Galais dan Coulumbe (2018) menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari *peer pressure* dari kolega dan anggota keluarga terhadap perilaku pemilihan dari seseorang. Terlebih lagi, penelitian yang sama turut menyatakan bahwa pengaruh terkuat mengenai sikap individu terhadap suatu pemilihan datang dari teman dekat dan dari pasangan dalam rumah tangga (Blais, Galais & Coulumbe, 2016). Keluarga P1 sebenarnya memiliki hubungan *kinship* yang lebih dekat terhadap paslon pilihannya, namun memilih untuk mendukung paslon yang didukung oleh mayoritas masyarakat suku Pura. Ini, menurut Weiner (2016), terjadi karena meski hubungan *kinship* didasarkan pada garis keturunan, konteks politik dan faktor sosial dalam masyarakat tradisional memiliki signifikansi yang cukup besar. Hal ini menjadi penting dalam konteks pemilihan paslon berdasarkan status *kinship*, karena batasan dari sebuah hubungan *kinship* dan pengaruh sosial yang muncul bersamanya dapat berubah dari waktu ke waktu (Weiner, 2016).

Sedangkan untuk P2, sebagai seorang suami dan kepala keluarga, ia memiliki pengaruh yang besar bagi keluarga dan terlebih lagi pasangannya. Pada pilkada 2018, ia mengancam anggota keluarganya untuk memilih paslon yang sama dengan yang ia pilih. Tindakan ini dapat dilihat sebagai sebuah bentuk *peer pressure* dalam konteks politik. P2 sebagai seorang lelaki dan kepala keluarga juga menunjukkan sikap otoritatif yang dimiliki oleh kepala keluarga di dalam keluarga tradisional di Indonesia yang bersifat patriarkal, di mana tugas dari kepala keluarga adalah mengatur dan melindungi keluarganya, dan Ayah (dan juga saudara-saudara dari keluarga ayah) memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan dalam keluarga tsb (Riany, Meredith & Cuskelly, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Montgomery (1989) juga menunjukkan bahwa keinginan dari keluarga inti dapat mempengaruhi pilihan politik dari anggota keluarga tersebut.

Pilihan politik berbeda yang diambil oleh kedua partisipan mengakibatkan konflik berupa perbedaan pendapat di dalam *nuclear family* dan *extended family* mereka. P1 yang menerima tekanan dalam keluarga besarnya karena memilih paslon yang berbeda dengan pilihan keluarga besarnya. Dalam menghadapi hal ini, ia memilih untuk tidak merespon dan menanggapi secara tenang semua tekanan yang datang kepadanya dari keluarga besarnya. Ia menghindari konfrontasi dari pihak keluarga dengan tidak menghadiri acara keluarga adat yang diselenggarakan selama masa kampanye sedang berlangsung. P1 menerangkan bahwa ia tidak ingin merasa sakit hati oleh kalimat yang mungkin akan dilontarkan keluarganya kepadanya. Hal ini, seperti yang dinyatakan oleh Gamble (dalam Mathew, 2017) menyatakan bahwa dalam melakukan *coping* terhadap sumber stress yang berada di luar kontrol, Individu cenderung mengambil sikap menghindari (*avoidance*) dan sikap coping lainnya daripada menghadapi sumber stressor. Sedangkan Aldwin (dalam Daişman, Yıldız, dan Yiğit 2017) mengemukakan bahwa bentuk pilihan coping individu terhadap stressor selalu dipengaruhi oleh kemampuan kontrol atas stressor, efikasi coping, dan tingkat kesulitan stressor yang dihadapi. Sedangkan bagi P2, setelah melontarkan ancaman terhadap keluarganya, ia dan keluarganya tidak lagi membicarakan lagi mengenai pilihan politik selama masa kampanye berlangsung.

Rekonsiliasi dan Komunikasi Keluarga setelah Pilkada

Setelah Pilkada berakhir, P1 merasa bahwa tidak ada lagi pertentangan diantara dirinya dan keluarga kandung serta keluarga besarnya, namun ia masih beberapa kali merasa canggung untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anggota keluarganya yang berbeda pilihan dengannya, terlebih dengan mereka yang menjadi timses dari paslon lawan yang memenangkan Pilkada.

Sebaliknya, bagi P2, setelah pilkada berakhir, ia tidak merasakan adanya perubahan dalam interaksi dan komunikasi di dalam keluarganya. Hal yang dialami kedua partisipan ini menurut Koerner dan Fitzpatrick (2006) adalah proses rekonsiliasi dalam komunikasi di dalam keluarga. Lebih jauh lagi, bentuk rekonsiliasi yang baik hanya dapat terjadi di dalam keluarga yang memiliki unsur komunikasi Konversasi di dalam pola komunikasi mereka. Meski berada dalam setting keluarga tradisional yang sama, P1 dan P2 mengalami proses rekonsiliasi yang sangat berbeda. P1 berada di dalam keluarga *Consensual*, di mana meski perbedaan pendapat tidak selalu diterima, proses komunikasi mengenai hal tersebut (aspek Konversasi) tetap dijunjung tinggi diantara tiap anggota keluarga. Sebaliknya, P2 (sebagai seorang kepala keluarga), mengubah pola komunikasi keluarga dari bentuk *Consensual* menjadi *Protective*. Perasaan kecewa yang ia alami sebagai akibat dari pengalamannya dengan paslon dan caleg yang dulu ia bantu kemudian mendorongnya untuk mempengaruhi pilihan politik keluarganya secara paksa, dengan demikian mengganti aspek konversasi menjadi konformitas, di mana kemandirian anggota keluarga (dalam hal ini pilihan politik) menjadi hilang dan ketaatan menjadi pola interaksi menggantikan diskusi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardyaningrum (2013), penyelesaian konflik dalam keluarga dengan model konformitas hanya akan melebarkan kekuasaan orang tua, dan cenderung mendorong anggota keluarga lainnya untuk mencari pelampiasan di luar keluarga tsb. Setelah pilkada berakhir pun, P2 menuturkan bahwa tidak ada upaya baik dari P2 sendiri atau anggota keluarganya untuk membahas mengenai ancaman yang sempat ia utarakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan diatas, dapat dikatakan bahwa komunikasi dalam keluarga tidak terlepas dari konteks budaya di mana keluarga itu berada. Kedua partisipan dalam penelitian ini adalah anggota keluarga dari sebuah *nuclear family* dan sekaligus juga *extended family* dalam corak kekerabatan dalam keluarga suku mereka. Pola pembentukan keluarga tradisional Alor secara patriarkal yang menjunjung tinggi otoritas ayah dan keluarga dari pihak ayah kemudian menyebabkan hampir tidak adanya perbedaan tingkatan komunikasi dan respek antara *nuclear family* dengan *extended family*, yaitu kepada saudara-saudara dari ayah. Otoritas dalam bentuk keluarga tradisional inilah yang akan mempengaruhi pola komunikasi di dalam keluarga yang memiliki dimensi konformitas dan konversasi.

Dalam konteks kultural, komunikasi dan interaksi masing-masing partisipan memperlihatkan kekhasan. Ada partisipan (P1) yang lebih menekankan aspek konversasi, dan sebaliknya, ada juga yang menekankan pada aspek konformitas (P2). *Nuclear family* dan *extended family* dari P1 masih menekankan aspek konversasi yang menjunjung tinggi diskusi mengenai perbedaan pendapat, meski perbedaan tersebut tidak disetujui oleh keluarganya. Sementara itu, P2 sebagai seorang kepala keluarga dari sebuah *nuclear family* mengubah aspek konversasi menjadi aspek konformitas ketika ia memberi ancaman terhadap keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan terjadinya perubahan dinamis antara aspek konversasi dan konformitas di dalam pola komunikasi keluarga di dalam setting keluarga tradisional.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh kuat dari nilai-nilai keluarga dan norma budaya masyarakat (dalam konteks masyarakat adat tradisional) dalam membentuk *voting behaviour* dari anggotanya. Pengaruh dari keluarga dan masyarakat yang diamati di dalam penelitian ini terasa cukup kuat, yang mengakibatkan pemilihan paslon oleh individu dari anggota masyarakat dalam setting ini mungkin tidak didasari oleh pemikiran/preferensi individu tersebut, namun merupakan bentuk *compliance* terhadap pilihan yang diambil oleh masyarakat di mana individu tersebut berada.

Selanjutnya, proses rekonsiliasi yang terjadi setelah konflik akibat pilkada juga kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh faktor *kinship* dan latar belakang *fam/marga* yang dimiliki oleh kedua partisipan. Perpecahan karena perbedaan pilihan politik tentu dapat menjadi sebuah masalah yang mengancam hubungan kekeluargaan, dan dalam hal ini, hubungan *kinship* melalui *fam/marga* berperan penting sebagai pengingat bagi P1 dan P2 untuk menjaga agar konflik antara mereka dan keluarga mereka tidak membesar. Pada P1, hal itu ditunjukkan dengan sikap menghindari cekcok dengan keluarga besarnya pada setiap pertemuan keluarga yang ia hadapi, sedangkan P2 mencegah konflik tsb dengan membagi suara di antara anggota keluarganya.

Saran

Studi yang berfokus untuk mengamati perilaku pemilihan politik dan komunikasi serta interaksi familial dan kultural masih langka dilakukan. Penelitian ini mencoba untuk mengisi kekosongan tersebut tanpa mengabaikan kelemahan yang ada seperti jumlah partisipan yang terbatas. Maka penelitian semacam ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan jumlah partisipan yang lebih besar dan mengkaji lebih dekat proses dinamis pemilihan oleh partisipan khususnya ketika pemilihan itu diperhadapkan perbedaan antara kepentingan politik di satu pihak dan relasi kekerabatan di pihak lain.

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan baca bagi masyarakat Alor agar menggali ulang dan lebih memaknai nilai-nilai luhur mengenai keluarga dan sikap kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur, seperti yang tertera di dalam *motto* “Tara Miti Tomi Nuku”, yaitu berbeda-beda namun tetap saling membantu. Motto ini harus dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan sosial masyarakat Alor yang menjunjung tinggi kekeluargaan.

Terakhir, penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Alor dalam mempromosikan model kampanye yang tidak menghilangkan nilai luhur dari kekeluargaan yang telah ada di Alor sejak dahulu, seperti nilai-nilai kebersamaan dan hubungan kekerabatan yang harus senantiasa dipelihara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghanim, Kaltham. (2013). The Hierarchy of Authority Based on Kinship, Age, and Gender in the Extended Family in the Arab Gulf States. *International Journal of the Jurisprudence of the Family*, 3, 329.
- Bailenson, J. N., Iyengar, S., Yee, N., & Collins, N. A. (2008). Facial similarity between voters and candidates causes influence. *Public Opinion Quarterly*, 72(5), 935-961.
- Blais, A., Galais, C., & Coulombe, M. (2019). The effect of social pressure from family and friends on turnout. *Journal of Social and Personal Relationships*, 36(9), 2824-2841.
- Borst, J. B. (2015). *A Systematic Review of the Effects of Family Conflict: Focusing on Divorce, Infidelity, and Attachment Style*. Retrieved from Sophia, the St. Catherine University research paper repository website : https://sophia.stkate.edu/msw_papers/426.
- Carole A. Barbato, Elizabeth E. Graham & Elizabeth M. Perse (2003). Communicating in the Family: An Examination of the Relationship of Family Communication Climate and Interpersonal Communication Motives. *Journal of Family Communication*, 3:3, 123-148, DOI: [10.1207/S15327698JFC0303_01](https://doi.org/10.1207/S15327698JFC0303_01)
- DetikNews.com (2013). Mendagri : 50 tewas akibat kerusuhan pemilu kada . Retrieved from <https://news.detik.com/berita/2208294/mendagri-50-tewas-akibat-kerusuhan-pemilu-kada> .
- Galvin, K. M., Braithwaite, D. O., & Bylund, C. L. (2015). *Family communication: Cohesion and change*. Routledge.

- Gökler Danışman, I., Yıldız, N., & Yiğit, İ. (2017). Development of a coping with stress scale for a non-western population of children and adolescents. *Anxiety, Stress, & Coping*, 30(6), 687-701.
- Haviland, W. A., Prins, H. E., & McBride, B. (2013). *Anthropology: The human challenge*. Cengage Learning.
- Hakim, Moh. (2012). The Contents of Indonesian child-parents attachment: An indigenous and cultural analysis. *The International Society for Social and Behavioural Development Bulletin*. 2. 11-15.
- Hill, R. B. (1998). Understanding Black family functioning: *A holistic perspective*. *Journal of Comparative Family Studies*, 29(1), 15-25, retrieved from <http://www.jstor.org/stable/41603543>.
- Itta, Hans (2016). *493 Tahun Alor ;Tokoh dan Peristiwa antara 1522-2015*. Bekasi. Hanfed Institute.
- Ironi pemilu di Indonesia pindah makam karena beda pilihan (2019). Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4383105/ironi-pemilu-di-indonesia-pindah-makam-karena-beda-pilihan> .
- Koerner, Ascan & Fitzpatrick, Mary. (2006). Family communication patterns theory: A social cognitive approach. DOI : 10.4135/9781452204420.n4.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (2014). *Pemilu Tanpa Perlindungan HAM, Laporan pemantauan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan menjelang pemilu 2014*.
- Kumparan.com (2017). Pilkada kisruh di Intan Jaya Papua timbulkan korban jiwa. Retrieved from <https://kumparan.com/@kumparannews/pilkada-kisruh-di-intan-jaya-papua-timbulkan-korban-jiwa>.
- Mathew, C. P. (2017). Stress and coping strategies among college students. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 22(8), 40-44.
- Montgomery, B. R. (1989). The influence of attitudes and normative pressures on voting decisions in a union certification election. *ILR Review*, 42(2), 262-279.
- O'Hara, K. L., Sandler, I. N., Wolchik, S. A., & Tein, J. Y. (2019). Coping in context: The long-term relations between interparental conflict and coping on the development of child psychopathology following parental divorce. *Development and psychopathology*, 31(5), 1695.
- Parker, Michael & Isbell, Linda. (2010). How I Vote Depends on How I Feel: The Differential Impact of Anger and Fear on Political Information Processing. *Psychological science*. 21. 548-50. 10.1177/0956797610364006.
- Peoples, James., Bailey, Garrick (2011). *Humanity : An Introduction to Cultural Anthropology*. Cengage Learning.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2018. *Kampanye Pemilihan Umum*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.
- Primasti, K. A., & Wrastari, A. T. (2013). Dinamika psychological wellbeing pada remaja yang mengalami perceraian orangtua ditinjau dari family conflict yang dialami. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, 2(3), 120-7.
- Riany, Yulina Eva & Meredith, Pamela & Cuskelly, Monica. (2016). Understanding the Influence of Traditional Cultural Values on Indonesian Parenting. *Marriage & Family Review*. DOI: 10.1080/01494929.2016.1157561.

- Ritchie, L. D. (1991). Family communication patterns: An epistemic analysis and conceptual reinterpretation. *Communication Research*, 18(4), 548–565.
<https://doi.org/10.1177/009365091018004005>
- Tirto.id (2018). : Perpecahan Masyarakat karena Pemilu Nyata. Retrieved from
<https://tirto.id/catatan-polmark-perpecahan-masyarakat-karena-pemilu-nyata-cVHj>.
- Segrin, C., & Flora, J. (2018). Family communication. Routledge.
- Sillars, A., Canary, D. J., & Tafoya, M. (2004). Communication, conflict, and the quality of family relationships. *Handbook of family communication*. 413-446.
- Sindonews. (2019). Mutasi langgar hukum, Bupati Alor dilaporkan ke KASN dan Bawaslu. Retrieved from <https://daerah.sindonews.com/read/1372767/174/mutasi-langgar-hukum-bupati-alor-dilapor-ke-kasn-dan-bawaslu-1548204255>.
- Tirto.id (2017). Kala Pilkada merusak hubungan Keluarga. Retrieved from
<https://tirto.id/kala-pilkada-merusak-hubungan-keluarga-ci5h>.
- Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. (2018). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja. *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, 15(2), 106.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. *Pemilihan Umum*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187. Jakarta.
- Valentino, N. A., Brader, T., Groenendyk, E. W., Gregorowicz, K., & Hutchings, V. L. (2011). Election night's alright for fighting: The role of emotions in political participation. *The Journal of Politics*, 73(1), 156-170.
- Vice News. (30 September 2017). Bangsa kita sekarang sedang sangat terpecah-belah . Retrieved from https://www.vice.com/id_id/article/vb7xg9/bangsa-kita-sekarang-sedang-sangat-terpecah-belah.
- Wardyaningrum, D. (2013). Komunikasi untuk penyelesaian konflik dalam keluarga: Orientasi percakapan dan orientasi kepatuhan. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(1), 47-58.
- Weiner, S. J. (2016). *Kinship Politics in the Gulf Arab States*. Arab Gulf States Institute in Washington, Washington.
- Willig, C. (2013). *Introducing qualitative research in psychology*. London. McGraw-hill education.